



DISEPAKATI 4 MENTERI

Dongkrak Industri TPT, PNS Gunakan Tekstil Lokal

YOGYA (KR) - Departemen Perindustrian (Depperin) menyerukan kepada kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menggunakan tekstil dan produk tekstil (TPT) hasil produksi dalam negeri, guna mendorong kinerja industri dan menciptakan sedikitnya 100 ribu lowongan kerja baru.

Untuk itu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris telah sepakat dengan Menteri Penda-yagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Taufik Efendi, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto guna mengeluarkan kebijakan penggunaan tekstil domestik di kalangan PNS.

"Kami telah melakukan pertemuan dengan Menpan, Mendiknas dan Mendagri agar masing-masing mengeluarkan kebijakan PNS menggunakan tekstil domestik," ujar Menperin Fahmi Idris di Jakarta kemarin.

Menurut Fahmi Idris, kebijakan itu diperlukan sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan penggunaan TPT lokal guna membantu industri TPT nasional yang terancam penurunan produksi akibat melemahnya permintaan pasar ekspor.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sendiri sebelumnya telah menyatakan, sebaiknya kebijakan penggunaan produk-produk lokal di kalangan pejabat maupun PNS dituangkan dalam suatu aturan atau kebijakan yang bersifat mewajibkan. Sehingga pelaksanaannya bisa lebih terjamin.

Sedang Walikota Yogyakarta Herry Zudianto mengatakan, dirinya sangat setuju keputusan empat menteri tentang penggunaan produk dalam negeri khususnya tekstil tersebut. Menurutnya, keputusan itu memang seharusnya dilakukan, untuk ketahanan ekonomi nasional. Bahkan ia berjanji akan memelopori penggunaan produk tekstil dalam negeri di Kota Yogyakarta.

"Secara pribadi saya sangat setuju. Karena penggunaan produk dalam negeri, jelas akan membuat ketahanan ekonomi nasional

kita berjalan dengan baik. Makanya hal seperti ini harus menjadi prioritas. Dan saya sanggup memelopori penggunaan produk dalam negeri khususnya tekstil," ujar Herry Zudianto kepada *KR*, Senin (16/3).

Dikatakan, walaupun nantinya hal tersebut perlu dituangkan dalam sebuah peraturan, sehingga menjadi kewajiban bagi PNS, pihaknya tidak keberatan. Mengenai masalah seragam PNS, Herry mengatakan selama ini pengadaannya dengan sistem lelang. Namun demikian, jika nantinya perlu dimasukkan catatan bahwa harus menggunakan tekstil dalam negeri, juga bukan masalah.

Sebagaimana dikutip *Antara*, akibat anjloknya permintaan pasar ekspor, industri TPT nasional seperti PT Sritex menurunkan harga sampai 50% agar bisa masuk ke pasar Amerika Serikat (AS). Hal itu dilakukan agar bisa bersaing dengan TPT asal Cina yang mampu memberi potongan harga sampai 80% di pasar utama tujuan ekspor TPT dari berbagai negara di dunia tersebut.

"Kita bisa melakukan hal itu (potongan harga sampai 80%) kalau bisa meningkatkan produktivitas dan kuat dalam inovasi teknologi," ujar Fahmi Idris. **(Ret/San)-c**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005